

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik yang dilaksanakan di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa pesta demokrasi yang ada di Indonesia yaitu pemilihan umum, masyarakat berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu umur diatas 17 tahun atau sudah menikah yang boleh memilih, Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (Kesuma, 2014). Pemilihan umum pada sebuah negara demokrasi sangat penting, sebagai rutinitas dalam menentukan regenerasi kepemimpinan, partisipasi politik khususnya pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan kunci menuju pemerintahan yang demokratis. Pada momen pemilu itulah, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya. Pada tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak yang pertama kali diadakan pada tanggal 17 April. Masyarakat Indonesia pada pemilu serentak akan memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPRD, DPR, DPRD Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak (Undang-undang pemilu, 2017).

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat

partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan umum. Sebaliknya bila tingkat partisipasi politik rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan pemilihan umum. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dengan tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum. (Usman, 2016). Partisipasi politik dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik mahasiswa untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pada pemilu serentak 2019.

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, 2.531 RT (BPKB, 2018). Kota Yogyakarta adalah kota yang terkenal dengan berbagai macam ragam, seperti halnya kota demokrasi, kota pariwisata dan kota pendidikan. Sehingga Kota Yogyakarta diperhatikan oleh Pemerintah, namun dalam hal pendidikan disini timbul adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan umum, ketika Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan maka penduduk di Kota Yogyakarta secara otomatis bertambah, khususnya yaitu mahasiswa karena di kota Yogyakarta sendiri terdapat berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta menurut data BPS Provinsi DIY Tahun 2018 bahwa jumlah mahasiswa negeri yaitu 99780 dan jumlah mahasiswa swasta yaitu 181854, maka secara tidak langsung dengan adanya pemilihan umum serentak tahun 2019 mahasiswa harus menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih, namun dalam hal tersebut rata-rata mahasiswa yang ada di Kota Yogyakarta bukan berasal dari Kota Yogyakarta melainkan berasal dari luar Daerah (Rapita, 2014). Menurut Kopertis Wilayah V, jumlah mahasiswa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 90.000 dan perempuan 85.000. Menurut survey yang di siarkan oleh 101.7 Swaragama FM Jogja), perbandingan jumlah warga asli Yogyakarta dan pendatang dari Kota/Negara lain adalah 35 : 65. Setiap bulan, setidaknya ada sekitar 1.320 pendatang

masuk di Kota Yogyakarta. Ini baru sebagian secara resmi yang melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mengurus surat keterangan pindah datang dari daerah asal mereka. Kebanyakan pendatang adalah pelajar dan mahasiswa, hanya sekitar 10% pendatang yang datang ke Yogyakarta untuk bekerja. Untuk di asrama saja ada sekitar 500 asrama pelajar dan mahasiswa dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia hadir di Yogyakarta. Ada 78,7% dari total jumlah mahasiswa di Yogyakarta adalah perantauan dari luar daerah. Untuk jumlah mahasiswa perantauan ini berjumlah sekitar 200.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

“KPU Kota Yogyakarta telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 sebanyak 300.863 pemilih. Dari jumlah tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kota Yogyakarta menemukan 1.260 data pemilih yang bermasalah. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Iwan Ferdian Susanto mengatakan setelah dilakukan pencermatan data pemilih sementara ditemukan data yang masih bermasalah. Data bermasalah yang ditemukan di antaranya data pemilih tanpa nomor induk kependudukan, data pemilih ganda, TNI/Polri aktif yang terdaftar, orang meninggal yang terdaftar, identitas tidak jelas, pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar” kata KPU Kota Yogyakarta yang diterbitkan di berita online Jumat, (6/7/2018) detiknews. "Bagi pemilih yang KTPnya luar daerah, seperti kebanyakan yang dialami oleh mahasiswa, harus membuat formulir A-5. Caranya cuma bawa KTP saja ke kelurahan asal, untuk mengurus surat keterangan pindah memilih. Nanti suruh minta diuruskan keluarganya di rumah. Lalu dibawa ke kelurahan tempat dia ngekos," kata Rani saat dihubungi Tribun Jogja Senin (13/8/2018). Komisi pemilihan umum seharusnya memiliki strategi yang mampu memberikan informasi sekaligus pemahaman mahasiswa luar daerah terhadap haknya dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara memberikan kelonggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum agar Pemilihan Umum terlaksana dengan baik

dan mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara datang ke TPS untuk memilih, sebagai warga negara. Sedangkan pada pemilihan umum 2019 akan di adakan secara serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Partisipasi juga berarti semua perilaku dan aktifitas masyarakat yang terlibat dalam semua proses politik yang berlangsung dalam sebuah sistem atau mekanisme politik tertentu. Setidaknya ada tiga variabel yang bisa dikatakan mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, yaitu sosialisasi pemilu oleh stakeholder, pendidikan politik masyarakat, dan yang terakhir kemandirian politik masyarakat.

Pemilihan umum di Yogyakarta khususnya partisipasi politik mahasiswa untuk datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya dalam memilih itu rendah, karena menurut mahasiswa mereka malas untuk datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya dalam memilih karena KPU Kota Yogyakarta kurangnya sosialisasi mengenai haknya untuk memilih bagi mahasiswa luar daerah yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk memilih, hanya sebagian mahasiswa saja yang mengetahui bahwa mahasiswa dapat menggunakan hak pilihnya dengan memilih di Yogyakarta namun dengan syarat membawa formulir A5 dan mengurusnya terlebih dahulu di kelurahan masing-masing. Strategi yaitu langkah yang dilaksanakan suatu organisasi atau individu didalam sebuah proses target tujuan untuk menentukan sebuah langkah yaitu jangka panjang dan menentukan tujuan, rangkaian tindakan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai di inginkan (Gleko, 2017). Menyusun strategi untuk suatu rencana adalah bagian dari proses perencanaan. Jika strategi yang diterapkan tepat maka semuanya akan berjalan dengan lancar, suatu strategi menjadi penting karena memberikan suatu fokus terhadap usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan (Setiawan, 2016). Sekretariat KPU kabupaten/kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan

norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undang dan memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen pemilu dan mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. maka dari penjelasan diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian.

Begitu juga mengenai hak suara pemilih khususnya mahasiswa luar daerah di Yogyakarta tidak bisa kita pungkiri bahwa mahasiswa luar daerah di Yogyakarta masih sulit untuk menggunakan hak pilihnya di Yogyakarta dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPU dan kurangnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk mengurus formulir A5, hak suara mereka kadang masih kurang diperhatikan. Padahal suara dari semua elemen masyarakat itu sangat penting. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pemerintahan, dan untuk memberikan gambaran pada dunia akademik serta untuk pengembangan pengetahuan mengenai strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa khususnya mahasiswa luar daerah di Yogyakarta pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini tentu membutuhkan acuan berfikir, dimana dalam tinjauan pustaka sendiri akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan lingkup permasalahan yang sama. Hal ini tentu akan memudahkan penulis dalam mengambil fokus kajian penelitian ini. Tentunya sudah banyak penelitian terkait dengan partisipasi politik dalam pemilu yang akan diuraikan dibawah ini.

Penelitian pertama, dilakukan oleh Guswan Nurholik pada tahun 2016 dengan judul *Strategi Kampanye KPUD Bantul dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam*

Pemilihan Bupati Bantul Periode 2015-2020. Penelitian ini fokus pada strategi kampanye. Penelitian ini menyimpulkan KPUD Bantul menjalankan perencanaan kampanye, implementasi program kampanye, hingga evaluasi dari program kampanye yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Novendi setiawan pada tahun 2016 dengan judul *Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah kabupaten bantul tahun 2015*. Penelitian ini fokus pada partisipasi pemilih pemula. Penelitian ini menyimpulkan memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan validasi data pemilih.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Desinta Dwi Rapita pada tahun 2016 dengan judul *Dasar pertimbangan hukum putusan hakim mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan pileg dan pilpres tahun 2014 dan 2019*. Penelitian ini fokus pada putusan hakim mahkamah konstitusi terkait pileg dan pilpres. Penelitian ini menyimpulkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan juga didasarkan pada pertimbangan hukum di luar hukum positif.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Rubian Ariviani dan Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto pada tahun 2016 dengan judul *Analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berkaitan dengan pemilihan umum serentak di Indonesia*. Penelitian ini fokus pada konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Penelitian ini menyimpulkan Pengaturan ambang batas sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dalam Pemilu pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya karena terdapat penggabungan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo, Asih Widi Lestari pada tahun 2017 dengan judul *Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah*. Penelitian ini fokus pada strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu pada tahun 2015 dapat dilihat dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Ali Usman pada tahun 2015 dengan judul *Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi lampung tahun 2014*. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik pemilih pemula. Penelitian ini menyimpulkan fakta menunjukkan meningkat partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi lampung sebesar 5,4% , ini dilihat pada tahun pemilihan 2008 jumlah partisipasi mencapai 70% dan pada tahun 2014 sebesar 75,4.

Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Agus Andika pada tahun 2016 dengan judul *Partisipasi Politik Penyandang Difabel Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta*. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik penyandang difabel. Penelitian ini menyimpulkan kemampuan merespon difabel di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yakni kesadaran semi intransitif, kesadaran naïf transitivity dan kesadaran kritis.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Awang Darumurti, Sakir, Tunjung Sulaksono dan Suranto pada tahun 2016 dengan judul *Pemetaan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul*. Penelitian ini fokus pada faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Penelitian ini menyimpulkan afisiliasi dengan orang

terdekat, stimulus partisipasi, kontrol sosial yang ketat, pragmatisme politik masyarakat, kepedulian lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Afriza Sanjaya pada tahun 2017 dengan judul *Warga binaan dan pemilu inklusi*. Penelitian ini fokus pada partisipasi warga binaan rumah tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dapat dikatakan berlangsung dengan baik, hal ini dapat dilihat dari dengan adanya keterbatasan akses informasi saat berada di dalam rumah tahanan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat warga binaan rumah tahanan kelas IIB Kabupaten Kulon Progo untuk dapat berpartisipasi pada pemilukada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.

Penelitian kesepuluh, dilakukan oleh Hangga Agung Bramantyo pada tahun 2016 dengan judul *Partisipasi Politik penyandang disabilitas dalam pemilukada kabupaten sleman tahun 2015*. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sleman 2015 bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman berjumlah aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, penulis menemukan kesamaan maupun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Kesamaan dari penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan umum dan partisipasi politik, namun yang menyebabkan perbedaan yaitu pada penelitian ini penulis ingin membahas strategi KPU Kota Yogyakarta yang berfokus pada partisipasi politik mahasiswa luar daerah di Yogyakarta.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk memberikan gambaran tentang kajian yang akan diteliti dalam pemilihan umum serentak yang diadakan di Yogyakarta, peneliti akan mendasarkan pada dasar teori

yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan kejadian yang dikaji maupun diteliti. Teori menurut Sarlito Wirawan Sarwono “Teori yaitu serangkaian proposisi atau hipotesa yang saling berkaitan tentang suatu kejadian (fenomena) atau beberapa kejadian lainnya (Sarwono, 1983).

1) Manajemen Strategi

a. Definisi Manajemen Strategi

Menurut L.H Walson dan Oey Liang Lie, manajemen yaitu sebagai ilmu dan seni. Ilmu karena manajemen adalah suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan telah diterima sebagai kebenaran yang universal. Manajemen juga memiliki sebuah asa yaitu asas manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai seni karena keberhasilan seorang pemimpin dalam usaha mencapai tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai “Sesuatu yang patut dikerjakan demi kelancaran komunikasi”.

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan (<https://kbbi.web.id/strategi> diakses pada 6/10/2018 pukul 8.30 WIB).

Karl Von Clausewitz (1780-1831) strategi yaitu suatu seni yang menggunakan cara pertempuran untuk mencapai tujuan, sementara Marthin Andreson (1968) merumuskan strategi yaitu seni yang melibatkan kemampuan pikiran/inteligensi untuk mengangkut semua sumber daya yang ada dalam mencapai sebuah tujuan dengan mendapatkan keuntungan yang efisien. Strategi itu pada hakekatnya adalah suatu perencanaan (Planning) dan manajemen (Management) untuk

mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya (Ruslan, 2005). Strategi juga bisa dikatakan upaya yang memuat kebijakan umum, kebijakan teknis dan oprasional untuk mencapai tujuan dari program yang telah dibuat (Setiawan, 2016). Strategi menurut Nawawi, dilihat dari sudut pandang Etimologis kata “strategik” dalam manajemen organisasi yaitu cara, kiat, taktik yang disusun secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah ke tujuan strategic organisasi (Nawawi, 2012). Chandler dalam Akdon (2012) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Teori Organisasi, struktur, desain dan aplikasi (1994: 134) strategi didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi.

b. Tujuan dan Manfaat Strategi

Tujuan manajemen strategi untuk melakukan pengamatan lingkungan kepengurusan strategi termasuk tujuan, misi, strategi dan kebijakan termasuk pengembangan program, prosedur, anggaran, pengembalian dan evaluasi (Hariyanto, 2018). Adapun Manfaat strategi menurut salusu ada beberapa seperti, identifikasi peluang yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan untuk di hindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki

organisasi, jadi organisasi dapat memperbaiki kelemahan dan dapat memberikan petunjuk untuk mengantisipasi perubahan awal dari eksternal. Semangat korps yakni dapat menciptakan semangat korps dan sinergi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Perubahan strategi yakni bila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen strategi arah perjalanan organisasi dengan tujuan dan misi yang dicapai (Salusu, 2008).

c. Perencanaan Strategi

Perencanaan strategi menurut Olsen dan Eadie dalam Hariyanto, suatu keputusan dan tindakan yang membentuk dan memandu untuk menjadi sebuah organisasi. Sebuah upaya yang didefinisikan untuk membuat suatu keputusan, dalam perencanaan strategi, proses perencanaan strategi ada 8 yaitu sebagai berikut:

1. Mencetuskan dan Menyetujui Suatu Proses Perencanaan.

Menegosiasikan persetujuan dengan orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal tentang semua upaya perencanaan strategi.

2. Mengidentifikasi Intruksi Strategi.

Sebuah organisasi harus menghadapi intruksi baik itu formal maupun informal.

3. Memperjelas Nilai-Nilai Organisasi dan Misi.

Misi organisasi yang sesuai dengan intruksi. Bagi organisasi maupun lembaga, berusaha untuk memenuhi kebutuhan politik dan sosial yang dapat diidentifikasi.

4. Menilai Lingkungan Internal dan Eksternal.

Eksternal, Kelompok perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang dihadapi oleh organisasi. Ancaman dan peluang dapat diketahui dengan memantau berbagai kecenderungan politik dan kekuatan, ekonomi, sosial dan teknologi. Internal, untuk mengenal kelemahan dan kekuatan internal, organisasi harus mengontrol sumber daya (inputs), kinerja (process) dan strategi sekarang (outputs).

5. Mengidentifikasi yang di Hadapi Organisasi Seperti Isu Strategi.

Dari 5 unsur yang telah dijelaskan di atas maka lahir yang namanya unsur ke 6 yaitu identifikasi isu strategis soal kebijakan yang mempengaruhi 5 unsur diatas.

6. Mengelola dan Merumuskan Isu-Isu Strategi.

Strategi didefinisikan sebagai pola kebijakan, tujuan, tindakan, program, keputusan atau alokasi sumber daya.

7. Menciptakan Visi Masa Depan yang Efektif.

Organisasi mengembangkan deskripsi bagaimana suatu organisasi dalam mencapai suatu keberhasilan strateginya (Hariyanto, 2018).

d. Analisis Lingkungan Strategi

Perubahan terhadap lingkungannya secara efektif dapat merespon, Sebuah organisasi publik harus memahami lingkungan eksternal dan lingkungan internalnya. Pemahaman mengenai lingkungan internal bermanfaat untuk mengetahui kelemahan (Weakness) dan kekuatan (Strengths), sedangkan lingkungan eksternal mengetahui adanya peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats).

1. Lingkungan internal.

Lingkungan internal yaitu suatu lingkungan yang posisinya ada di dalam organisasi penilaian terhadap lingkungan internal organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan organisasi tersebut.

- a) Sumber Daya (Inputs)
- b) Strategi Sekarang (Process)
- c) Kinerja (Outputs)

2. Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal yaitu suatu lingkungan yang posisinya ada diluar organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi. Kecenderungan dan kekuatan biasanya dibagi 4 kategori: ekonomi, politik, sosial dan teknologi.

3. Analisis Isu Strategi.

Inti dari perencanaan strategi yaitu pengidentifikasian isu. Dalam mengidentifikasi isu strategi ini menggunakan pendekatan langsung dengan mempelajari misi dan visi, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, ancaman dan peluang serta mengidentifikasi isu strateginya (Setiawan, 2016). Matrik SWOT yaitu alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana ancaman dan peluang yang di hadapi perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

- a) *Strengths/Opportunities.*

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

- b) *Strengths/Threats.*

Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

c) *Weakness/Opportunities.*

Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

d) *Weakness/Threats.*

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. (Rangkuti, 2006)

Tabel 1.1

Model Analisis Matrik SWOT

Faktor Eksternal	Opportunities	Threats
Faktor Internal	(O)	(T)
Strengths (S)	Strategi S.O Tentukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi S.T Tentukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
Weakness (W)	Strategi W.O Tentukan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi W.T Tentukan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

(Sjafrizal, 2016:254)

Tabel diatas menampilkan 6 kotak, 2 kotak paling atas yaitu kotak eksternal seperti peluang dan ancaman. Sedangkan 2 kotak yang sebelah kiri yaitu faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan organisasi. 4 kotak lainnya yaitu isu-isu strategi yang muncul dari faktor eksternal dan internal (Salusu, 1996).

- a. Strategi (*Strengths* (S) / *Opportunities* (O)).

Strategi ini dibikin berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan semua kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang besar.

- b. Strategi (*Strengths* (S) / *Threat* (T)).

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- c. Strategi (*Weakness* (W) / *Opportunities* (O)).

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- d. Strategi (*Weakness* (W) / *Threat* (T)).

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Dalam pola perencanaan berdasarkan SWOT, perencanaan yang baik bekerja dalam dua langkah. *Langkah pertama*, perencanaan strategi membuat gambaran jelas mengenai arah yang hendak dituju (visi dan apa yang menjadi tujuan dan alasan eksistensi organisasi tersebut). Berdasarkan visi dan tugas ini perencanaan strategi mengembangkan tujuan yang merupakan hasil akhir yang akan dapat diukur dan menunjukkan apakah organisasi terkait makin mendekati visi dan tujuan atau malah menjauhinya. *Langkah kedua*, perencanaan strategis berusaha menggambarkan pada dasar realistis lingkungan kerja. Ada dua lingkungan semacam ini : (i) lingkungan eksternal yang merupakan wilayah dimana pihak lain mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

organisasi tersebut, dan (ii) lingkungan internal yang terdiri dari sumber daya, kekuatan serta berbagai kemungkinan dan tuntutan dari organisasi itu sendiri.

Analisis dalam perencanaan politik SWOT adalah menjalin bidang pembentukan visi atau pembentukan tujuan dan analisis lingkungan sekitar, organisasi harus mengembangkan pilihan strategi atau jalan alternatif untuk mencapai tujuan akhir.

Strength (S) merupakan kekuatan, bisa dilihat dari kekuatan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta antara lain: Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yaitu 1 Unit dan memiliki sejumlah pegawai, besarnya jumlah relawan demokrasi yang tersebar di beberapa kecamatan. Weakness (W) yaitu kelemahan-kelemahan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta harus juga dianalisis untuk dicarikan sebuah solusi penyelesaian agar tidak menimbulkan kegagalan dalam meningkatkan jumlah partisipasi politik mahasiswa luar daerah di Yogyakarta. Opportunities (O) sebuah peluang atau kesempatan yang bisa didapatkan untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah di Yogyakarta harus dianalisis. Contohnya jika keberhasilan relawan demokrasi 2019 dalam memberikan pengarahan kepada mahasiswa luar daerah di Yogyakarta tentang hal akan pentingnya memilih dapat meningkatkan jumlah partisipasi mahasiswa luar daerah di Yogyakarta. Threat (T) yaitu sebuah ancaman, merupakan faktor yang terakhir harus diteliti untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah di Yogyakarta.

2) Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan asal dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya dari bahasa latin yaitu *Participaties*. Kata partisipasi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu *paus* yang berarti bagian dan *cipare* yang berarti mengambil. Dari kata tersebut partisipasi berarti dapat diartikan mengambil bagian. Kata partisipasi itu sendiri dari kata kerja *Paricipare* yang berarti ikut serta. Itu arti kata partisipasi menurut epilogis (Sanjaya, 2017). Partisipasi merupakan arti dari bahasa inggris “Participation” yang diartikan mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi diartikan sebagai suatu tindakan berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan peran serta dalam melakukan tindakan. Partisipasi politik adalah kegiatan kelompok atau seseorang untuk mengikuti secara aktif dalam kehidupan politik, dengan memilih pimpinan negara secara tidak langsung maupun secara langsung akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah (Public policy).

Herbert McClosky berpendapat, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara tidak langsung maupun secara langsung (Budiarjo, 2013). Partisipasi adalah penentu sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi, sehingga akhirnya mendorong individu untuk berperan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai definisi umum, sesuai dengan yang diartikan oleh Miriam Budiarjo (Budiarjo, 1982), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara datang ke TPS untuk memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak

langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik juga, senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.

Partisipasi menurut T.B Simatupang “Partisipasi adalah kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama antara semua warga yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam negara pancasila yang berdasarkan hak dan kewajiban yang sama 10 untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membangun masa depan (Simatupang, 1983).

b. Bentuk-bentuk partisipasi

Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Partisipasi Aktif.

Kegiatan masyarakat mengusulkan mengenai kebijakan umum, mengusulkan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengusulkan saran dan kritik perbaikan untuk meluruskan kebijakan, ikut serta dalam hal memilih pemimpin pemerintah dan membayar pajak.

2. Partisipasi Pasif.

Kegiatan menaati perintah/peraturan menerima dan melaksanakan begitu saja keputusan oleh pemerintah.

3. Partisipasi Tidak Aktif.

Kegiatan yang tindakannya untuk tidak melakukan sesuatu, tidak memilih, tidak membayar pajak, tidak menaati hukum, tidak menghadiri kampanye politik, tidak aktif dalam parpol (Surbakti, 2010).

c. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

1. Faktor Internal.

Faktor yang berasal dari diri sendiri dan orang terdekat di sekitar seseorang tersebut atau sebuah kelompok.

2. Faktor Eksternal.

Faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor eksternal biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau dari kelompok kemenangan pasangan calon kandidat yang menjadi peserta dalam pemilihan umum (Fathia, 2016).

3) Pemilu Serentak

a. Definisi Pemilu

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik yang dilaksanakan di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa pesta demokrasi yang ada di Indonesia yaitu pemilihan umum, masyarakat berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dengan syarat yang telah ditetapkan oleh KPU yaitu umur diatas 17 tahun dan yang sudah menikah yang boleh memilih. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali (Kesuma, 2014). Pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam

bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada (Gaffar, 2012).

Secara yuridis konstitusional, berkenaan dengan pemilihan umum di Indonesia dewasa ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

G. Definisi Konseptual

1) Strategi

Strategi adalah teknik yang dirancang untuk mencapai suatu keberhasilan atau tujuan tertentu. Strategi pada umumnya terkait dengan organisasi, strategi dirancang oleh pemimpin maupun petinggi organisasi agar langkah yang dilaksanakan oleh organisasi dapat mencapai target dan sasaran tujuan organisasi.

2) Partisipasi

Secara garis besar bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara datang ke TPS kemudian menggunakan haknya untuk memilih pemimpin Negara/Kota/Kabupaten/Legislatif secara langsung, Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

3) Pemilu Serentak

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan politik yang dilaksanakan di Indonesia. Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak pada 17 April 2019. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Yogyakarta nantinya tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legislatif lainnya. Sehingga masyarakat harus bersiap melakukan pemilu tersebut. Kita akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota hingga memilih Presiden dan Wakil Presiden.

H. Definisi Operasional

1) Strategi

Strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

- a. Mengidentifikasi intruksi strategi dan misi organisasi dalam mengidentifikasi untuk mengukur kinerja organisasi.
- b. Analisis lingkungan strategi dengan menggunakan analisis SWOT, kemampuan organisasi untuk merespon secara efektif terhadap perubahan eksternal dan internal.
 1. Lingkungan Internal.
 - a) Weakness (kelemahan)
 - b) Strengths (kekuatan)

2. Lingkungan Eksternal.
 - a) Threats (ancaman)
 - b) Opportunities (peluang)
- c. Analisis Isu Strategi

Organisasi bisa menyusun strategi dengan efektif agar mendapatkan kekuatan dari keuntungan dan peluang sekaligus meminimalkan atau mengatasi ancaman dan kelemahan.

1. *Strength/Opportunities.*

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2. *Strengths/Threats.*

Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

3. *Weakness/Opportunities.*

Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

4. *Weakness/Threats*

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sangatlah penting dalam penulis untuk penelitian, untuk menentukan berhasil atau tidaknya penelitian metodologi sangatlah berperan. Karena metodologi yaitu sebuah arah yang memberikan petunjuk dalam berfikir (Winarno, 1996).

- 1) Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati. Adapun alasan penelitian ini untuk mengetahui strategi KPU Kota Yogyakarta dalam

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilu serentak tahun 2019 di Yogyakarta. Peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana strategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa luar daerah pada pemilu serentak tahun 2019 di Yogyakarta.

2) Lokasi Penelitian.

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di KPU Kota Yogyakarta, yang membuat lokasi tersebut menarik yaitu karena KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah sebuah kota pendidikan dimana mayoritas penduduk di Yogyakarta adalah mahasiswa luar daerah. Penelitian ini penulis juga mengambil lokasi penelitian di Kopertis Wilayah V, karena untuk mengetahui jumlah valid mengenai mahasiswa luar daerah di Yogyakarta sebagai pendukung penelitian ini.

3) Unit Analisis Data.

Objek pada penelitian ini yaitu komisioner KPU Kota Yogyakarta, mahasiswa luar daerah di Yogyakarta dan Kopertis Wilayah V.

4) Jenis Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan data utama atau data primer untuk mendukung kevalidan data dari penelitian maka digunakan juga data pendukung atau data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang di peroleh oleh peneliti sebagai sumber informasi secara langsung pada objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara dan observasi langsung, yang bersumber langsung dari komisioner KPU Kota Yogyakarta, mahasiswa luar daerah di Yogyakarta dan Kopertis Wilayah V (Bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan).

Tabel 1.2
Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah
Strategi KPU Kota Yogyakarta	Komisioner KPU Kota Yogyakarta	Wawancara	1
Tanggapan mahasiswa luar daerah di Yogyakarta	Mahasiswa luar daerah di Yogyakarta	Wawancara	10
Jumlah mahasiswa di Kota Yogyakarta	Kopertis Wilayah V (Bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan).	Wawancara	1

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta laporan-laporan maupun buku-buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini melalui Kopertis Wilayah V untuk mengetahui jumlah mahasiswa di Kota Yogyakarta dan Jumlah mahasiswa luar daerah di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.3

Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data
Jumlah mahasiswa di Kota Yogyakarta	Kopertis Wilayah V (Bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan).

5) Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Penelitian ini melakukan wawancara kepada:

1. Komisioner KPU Kota Yogyakarta
2. Perwakilan mahasiswa luar daerah di Yogyakarta khususnya yang kuliah di Kota Yogyakarta. Yang akan penulis wawancarai yaitu mahasiswa yang kuliah di universitas, dimana posisi kampusnya terletak di Kota Yogyakarta dan mahasiswa bertempat tinggal juga di Kota Yogyakarta, yaitu: UKDW, UTY, UAD, UST, ITY, UII, Universitas Janabadra. Jadi kesimpulan yang di

wawancarai ada 10 orang dan Setiap universitas yang di wawancarai berjumlah 1-2 orang, wawancara dilakukan dengan cara datang langsung ke universitas yang telah ditentukan kemudian memilih salah 1 orang untuk di wawancarai dan sebelum waktu yang telah ditentukan untuk mewawancarai maka penulis sebelumnya janji terlebih dahulu kepada yang akan di wawancarai saat observasi. Yang penulis wawancarai yaitu mahasiswa luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku. Alasan penulis memilih daerah tersebut karena daerah tersebut mewakili Indonesia bagian Timur, Tengah dan Barat.

Alasan peneliti mewawancarai orang-orang tersebut untuk mendapatkan informasi/keterangan yang valid dengan cara interview/wawancara secara langsung, sehingga memperlancar proses penelitian penulis. Karena orang-orang tersebut sesuai dengan bidang objek yang diteliti sesuai dengan keahliannya dalam masalah penelitian ini.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan, yang di Observasi dalam penelitian ini adalah objek itu sendiri yaitu KPU Kota Yogyakarta khususnya komisioner dengan maksud untuk mendapatkan informasi/keterangan sehingga memperlancar penulis dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan disajikan datanya dalam pembahasan, baik berupa catatan, agenda, photo, surat kabar dan sebagainya yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap untuk mengumpulkan data melalui wawancara, Seperti yang dijelaskan Kartodirdjo dalam Bungin (2008:122) dokumen yang dimaksud seperti otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman atau rakyat, photo, tape, microfilm, disc, compact disc, data yang disimpan di website, flashdisk, dan sebagainya.

6) Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman menawarkan satu teknik data yang disebut analisis interaktif. Prosesnya terdiri dari tiga bagian yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Karena keberadaan sebuah data akan menunjang keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian tanpa data tidak lebih dari sekedar asumsi yang tidak memiliki dasar kuat untuk dipertanggung jawabkan.

1. Reduksi Data.

Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data yang sama. Data tersebut kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan sebagai bahan penyaji data.

2. Penyajian Data.

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu pengecekan secara berulang kali dengan upaya membandingkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, pernyataan narasumber satu dengan narasumber lainnya serta melakukan *cross check* terhadap data lapangan (Sugiyono, 2015).